

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN						
No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen/berkas/arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d. 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM)berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Melindungi hak dasar manusia (HAM)berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d. 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Melindungi hak dasar manusia (HAM)berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Daftar Penilaian Kinerja PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf - PP No. 10 Tahun 1979 Tentang penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Melindungi hak dasar manusia (HAM)berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Data rekam medis PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis (Pasal 10)	Melindungi hak dasar manusia (HAM)berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Dapat merugikan PNS - Melanggar HAM	- Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia - Untuk melindungi keamanan dan Kenyamanan PNS
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	Sebagai Dasar Penetapan Kebijakan Dalam Pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Untuk Menjamin Rekaman Kegiatan dan Peristiwa	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
8	Komponen Nilai Peserta Diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h nomor 5	Melindungi hak dasar manusia (HAM)berdasar-kan konstitusi	Tidak Terbatas	Mengungkap perilaku seseorang	Melindungi pribadi seseorang
9	Naskah Ujian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h nomor 4	Untuk menjamin keberhasilan tujuan pendidikan dan pelatihan	Tidak Terbatas	Apabila dibuka mengakibatkan terhambatnya proses evaluasi untuk mengetahui informasi tingkat kemampuan seseorang	Melindungi kerahasiaan proses evaluasi untuk menghasilkan kemampuan seseorang

KEPALA BADAN BADAN DIKLAT
PROVINSI JAWA TENGAH



HERRU SETIADHIE